



PENETAPAN

Nomor 380/Pdt.P/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Ttl: Bima, 15-10-1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, Nik: 6472021510790009 tanggal 29-02-2020, tempat kediaman KABUPATEN BIMA, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 11 Agustus 2020 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 380/Pdt.P/2020/PA.Bm., tanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama: **Nur Syanti binti Irwan**, Ttl, Samarinda, 14-06-2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal KABUPATEN BIMA dengan seorang laki-laki yang bernama : **Ibnu Irwan Pratomo bin Prakoso**, Ttl: Jakarta, 16-09-2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal KABUPATEN BIMA;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pen. No. 380/Pdt.P/2020/PA.Bm



2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon yang bernama **Nur Syanti binti Irwan** tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak perempuan Pemohon sudah pernah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Nomor: 379/Kua.18.06.03/PW.01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

Hlm. 2 dari 13 hlm. Pen. No. 380/Pdt.P/2020/PA.Bm



A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon yang bernama **Nur Syanti binti Irwan**, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Ibnu Irwan Pratomo bin Prakoso**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu usia anaknya sampai 19 tahun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama dan lagi pula Pemohon dan keluarga dari calon mempelai laki-laki telah mufakat dengan masyarakat (mbolo weki) rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Syanti binti Irwan telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa dia telah lama berpacaran dan berhubungan terlalu dekat dengan calon suami yang bernama Ibnu Irwan Pratomo bin Prakoso dan ingin menikah untuk menghindari hal-hal negatif yang melanggar norma agama;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pen. No. 380/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah di pinang orang lain;
- Bahwa dia siap menikah dengan calon suami tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa calon suami anak dari Pemohon yang bernama Ibnu Irwan Pratomo bin Prakoso juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia telah berhubungan dengan anak Pemohon terlalu dekat dan sudah berpacaran selama dua tahun dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar aturan agama, ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah meminang oleh orang lain;

Bahwa ayah angkat dari calon suami anak Pemohon yang bernama Lukman bin Muhtar juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak angkatnya telah berpacaran lama dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak angkatnya telah berhubungan dengan anak Pemohon terlalu dekat;
- Bahwa anaknya tidak pernah meminang dan melamar orang lain;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa kedua keluarga sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia dan anak angkatnya tersebut akan bertanggung jawab terhadap anak Pemohon dan ia siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Pen. No. 380/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa ia akan ikut membimbing anaknya dengan anak Pemohon jika telah menikah kelak;
- Bahwa tujuan Pemohon dan ia sebagai orang tua menikahkan anak-anaknya untuk menghindari pelanggaran terhadap norma agama;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanudin Nomor 6472021510790009 tanggal 29 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosmiati Nomor 5206-LT-06052019-0033 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-379/Kua.18.06.03/PW.01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa, tempat kediaman di RT. 19, RW. 05, Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi bertetangga dengan mereka;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Pen. No. 380/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak Pemohon kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon di tolak oleh KUA;
- Bahwa anak Pemohon telah di lamar calon suami anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon telah berhubungan dekat dan telah lama berpacaran;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena untuk menghindari hal-hal negatif terutama ingin menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Pemohon bersama keluarga calon suami sudah mengadakan rapat bersama masyarakat untuk merencanakan pernikahan anaknya dengan calon suaminya dan tinggal menunggu keputusan dari Pengadilan;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di RT. 18, RW. 05, Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa anak Pemohon telah di lamar calon suami anak Pemohon dan telah diterima dan Pemohon bersama keluarga calon suami

Hlm. 6 dari 13 hlm. Pen. No. 380/Pdt.P/2020/PA.Bm



anak Pemohon telah mengadakan pertemuan dengan masyarakat kalau dalam istilah bima (mbolo weki) untuk rencana pernikahan anak Pemohon;

- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);

- Bahwa anak Pemohon tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;

- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pernah melamar dan meminang orang lain;

- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;

- Bahwa anak Pemohon telah berhubungan dekat dengan calon dan telah berpacaran lama dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan anak Pemohon dan calon suaminya dan kedua keluarga ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak Pemohon kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon di tolak oleh KUA;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hlm. 7 dari 13 hlm. Pen. No. 380/Pdt.P/2020/PA.Bm



sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Nur Syanti binti Irwan, umur 18 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ibnu Irwan Pratomo bin Prakoso, umur 19 tahun, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan

Hlm. 8 dari 13 hlm. Pen. No. 380/Pdt.P/2020/PA.Bm



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Nur Syanti binti Irwan, umur 18 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ibnu Irwan Pratomo bin Prakoso, umur 19 tahun, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, bapak calon suami Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.2 dan para saksi, telah terbukti anak Pemohon masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, bapak calon suami Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.2 dan para saksi, telah terbukti Pemohon adalah bapak dari Nur Syanti binti Irwan, sehingga Pemohon adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai perempuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.3 dan para saksi, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya dengan alasan calon pengantin wanita belum cukup umur;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Pen. No. 380/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai

Hlm. 10 dari 13 hlm. Pen. No. 380/Pdt.P/2020/PA.Bm



perempuan sering berhubungan badan dengan calon mempelai pria bahkan dua kali selarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, bapak angkat calon suami anak Pemohon serta keterangan para saksi, terbukti anak Pemohon bernama Nur Syanti binti Irwan dengan calon suaminya yang bernama Ibnu Irwan Pratomo bin Prakoso sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen. No. 380/Pdt.P/2020/PA.Bm



Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nur Syanti binti Irwan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ibnu Irwan Pratomo bin Prakoso;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hlm. 12 dari 13 hlm. Pen. No. 380/Pdt.P/2020/PA.Bm



Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Pen. No. 380/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs.H. Musaddad, S.H.

Hlm. 14 dari 13 hlm. Pen. No. 380/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)